

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI RIAU
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 28 S/D 30 SEPTEMBER 2017**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan, khususnya terkait dengan pengawasan kinerja Pemda Provinsi Riau dalam persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Wilayah Provinsi Riau, yaitu ada 1 kab/kota yang melaksanakannya dan 1 Pilkada Provinsi. Serta Pengawasan terhadap KPU dan Bawaslu Provinsi Riau yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau berjumlah 15 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. Bapak Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si / Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Anggota Tim Komisi II DPR RI terdiri dari:

1. Agus Sutanto
2. H. KRH. Hendry Yosodiningrat
3. Darmadi Durianto
4. Dwi Ria Hetifa
5. Dadang S Muchtar
6. Agung Widyantoro
7. Dr. Hetifah, MPP
8. Suasana Dachi, SH
9. E.E. Mangindaan, S.IP
10. Ir. H. Hari Kartana
11. Libert Kristo Ibo
12. H. Yandri Susanto, S, Pt
13. Ammy Amalia Fatma Surya
14. Baidowi, S, Sos, M. Si
15. Drs. Chairul Anwar, S. Pt
16. H. Firmansyah Mardanoes
17. Dr. H. Mardani, M. Eng
18. Drs. Tamanuri MM
19. DR. Rufinus Hotmaulana H, SH, MM, MH

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 1 (satu) Tenaga Ahli dan 3 (tiga) orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari Lembaga Pemberitaan DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 September 2017 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau di aula Dang beringin kantor Gubernur Provinsi Riau. Komisi II DPR RI diterima oleh Wakil Gubernur provinsi Riau, KPU Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau, Perwakilan dari Polda Riau dan Danrem Kodam I Bukit barisan serta jajaran dan Segenap KPUD dan Panwaslu Ka. Indragiri Hilir yang ikut melaksanakan pilkada serentak 2018.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor Gubernur Riau adalah Sebagai Berikut:

TERKAIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU

EVALUASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

REGULASI

1. Kurang minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara ad hoc pada setiap pemilihan yang disebabkan beberapa aspek, seperti strata pendidikan, sulitnya akses pada setiap wilayah dll.
 2. Persyaratan rekrutmen memberatkan (surat keterangan pengadilan, umur minimal 25 tahun, dll)
 3. Beratnya beban tugas dan tanggungjawab serta resiko hukum yang harus diterima tidak sebanding lurus dengan honorarium yang diterima, termasuk jaminan kesehatan dan kecelakaan serta bantuan hukum.
 4. Besaran honorarium mengacu kepada Upah Minimum Prov/Kab/Kota.
- Adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi.

PROSES PILKADA DAFTAR PEMILIH

1. Masih ditemukannya NIK Invalid, NKK Invalid, Ganda, Meninggal dunia, pindah alamat, perubahan status dalam DP4 yang diterima
2. Masih terdapat dalam DPS warga yang bukan penduduk setempat (tidak memiliki identitas KTP setempat) tetapi namanya terdapat dalam DPS.
3. Masih terdapatnya warga yang bukan penduduk setempat (Bukan KTP setempat) tetapi namanya terdapat dalam DPSHP.
4. Masih adanya warga yang tidak merekam E-KTP
5. Penduduk di daerah perbatasan masih ada yang memiliki 2 (dua) KTP seperti permasalahan 5 (lima) desa antara Rokan Hulu dan Kampar, Pekanbaru dan Kampar sehingga menyulitkan proses pendataan pemilih.

TATA KELOLA PEMILIHAN SOSIALISASI

Kurang partisipasi parpol dan peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi, sehingga pemilih kurang mengenal keberadaan peserta pemilu dan parpol, visi, misi dan program

Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Riau Dalam Rangka Pilkada Serentak Provinsi Riau (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau) Tahun 2018

- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Provinsi Riau pada Tanggal 4 Juli 2017.
Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan dana bantuan hibah untuk KPU Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp. 324.000.000.000,-
- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan BAWASLU Provinsi Riau tanggal 4 Juli 2017.

Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan dana bantuan hibah untuk BAWASLU Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp. 84.901.150.000,-

Dukungan Dana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Pilkada Serentak Provinsi Riau (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir) Tahun 2018

- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Kab. Indragiri Hilir pada Tanggal 25 Juli 2017.
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir telah memberikan dana bantuan hibah untuk KPU Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp. 45.077.000.000,-
- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masih dalam proses. Adapun besaran Pendanaan bantuan hibah untuk PANWAS Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp. 4.836.065.000,-

PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2018

- Pemilihan Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 di Provinsi Riau yaitu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.
- Untuk Mendukung Aman, Sukses dan lancar Pemilihan Pilkada Pemerintah Provinsi Riau telah Membentuk Desk Pilkada Provinsi Riau Tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 (Proses Harmonisasi Biro Hukum).

TAHAPAN PERSIAPAN PILKADA SERENTAK PROVINSI RIAU 2018

Perencanaan Program dan Anggaran (terakhir 27 September 2017)
Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (terakhir 27 September 2017)
Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggara Pemilihan (terakhir 27 September 2017)
Sosialisasi kepada masyarakat (14 Juni 2017 – 23 Juni 2018)
Pembentukan PPK, PPS (12 Oktober 2017 – 11 November 2017)
dan KPPS (3 April 2018- 3 Juni 2018)
Pemantauan Pemilihan (12 Oktober 2017 – 11 Juni 2018)
Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (24 November 2017 – 30 Desember 2017)
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (30 Desember 2017-27 Juni 2018))

Pemungutan dan Penghitungan di TPS	27 Juni 2018
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 Juni 2018 – 9 Juli 2018
Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	Setelah MK mencantumkan permohonan PHP
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan MK
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan MK	Paling lambat 3 hari setelah penetapan, putusan smisal atau putusan MK dibacakan
Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih	Paling lama 3 hari setelah penetapan paslin terpilih
Evaluasi dan Pelaporan Tahapan	Paling lama 3 bulan setelah pengusulan pengangkatan aslon

TERKAIT KPU PROVINSI RIAU

EVALUASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

A. REGULASI

- Kurang minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara ad hoc pada setiap pemilihan yang disebabkan beberapa aspek, seperti strata pendidikan, sulitnya akses pada setiap wilayah, dll.
- Persyaratan rekrutmen memberatkan (surat keterangan pengadilan, umur minimal 25 tahun, dll)
- Beratnya beban tugas dan tanggungjawab serta risiko hukum yang harus diterima tidak sebanding lurus dengan honorarium yang diterima, termasuk jaminan kesehatan dan kecalakaan serta bantuan hukum. Besaran honorarium mengacu kepada Upah Minimum Prov/Kab/Kota
- Adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi.

B. PROSES PILKADA

- Daftar Pemilih
 - o Masih ditemukannya NIK Invalid, NKK Invalid, Ganda, Meninggal Dunia, pindah alamat, perubahan status dalam DP4 yang diterima.
 - o Masih terdapat dalam DPS warga yang bukan penduduk setempat (tidak memiliki identitas KTP setempat) tetapi namanya terdapat dalam DPS.

- Masih adanya warga yang tidak merekap E-KTP
- Penduduk di daerah pebatasan masih ada yang memiliki 2 (dua) KTP seperti permasalahan 5 (lima) desa antara Rokan Hulu dan Kampar, Pekanbaru dan Kampar sehingga menyulitkan proses pendataan pemilih.
- Pencialonan
 - Jumlah persentase minimal dukungan bakal calon perseorangan sebaiknya ditentukan jumlah batasan minimal pasa setiap kecamatan berdasarkan persentase jumlah penduduk perkecamatan.
 - Pendaftaran bakal pasangan calon, kehadiran pengurus partai politik (ketua dan sekretaris) pada saat pendaftaran bakal pasangan calon harus diatur secara tegas.
- Kampanye
 - Pelaporan dana kampanye (penerimaan dan penggunaannya) masih bersifat formal.
 - Debat Publik dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali.
- Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Waktu untuk scan C1 harusnya ditambah.

C. TATA KELOLA PEMILIHAN

- Perencanaan
 - Aturan penyusunan anggaran yang lambat keluarnya sehingga anggaran yang sebelumnya sudah disusun berubah.
- Penguatan Kelembagaan
 - Perlu adanya rapat koordinasi berkelanjutan.
- Sosialisasi
 - Kurang partisipasi parpol dan peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi, sehingga pemilih kurang mengenal keberadaan peserta pemilu dan parpol. Visi, misi dan program.
- Keuangan
 - Sulitnya dalam pengumpulan SPJ dari badan Ad hoc (PPK dan PPS).

STRATEGI KPU PROVINSI RIAU:

Pada permasalahan Data Pemilih dipebatasan, strategi yang dilakukan adalah dengan:

1. Memberikan perhatian khusus terhadap PPK atau PPS;
2. KPU Kabupaten/Kota langsung turun ke lokasi;
3. Melakukan pemetaan wilayah rawan dengan membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM).

**ANGGARAN NPHD PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018
SE PROVINSI RIAU**

No	Nama Satker	Anggaran NPHD Pemilihan Tahun 2018	Rencana Penarikan					
			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Termin I	Termin II	Termin III	Termin I	Termin II	Termin III
1.	KPU Provinsi Riau	324 M	25 M	50 M	-	249 M		
2.	Kab. Indragiri Hilir	45 M	12 M	-	-	33 M		

jumlah warga Provinsi Riau yang telah memiliki E-KTP maupun yang belum memiliki e-KTP dan upaya KPU Provinsi agar masyarakat yang belum memiliki E-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta masalah teknis lainnya.

- Jumlah warga Provinsi Riau yang belum melakukan perekaman e-KTP adalah 763.063 (Disdukcapil Provinsi Riau, April 2017).
- Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP tetap dapat menggunakan hak pilihnya adalah:
 1. KPU Provinsi Riau bekerjasama dengan instansi terkait;
 2. KPU Provinsi Riau melakukan rapat koordinasi dengan Disdukcapil;
 3. Meningkatkan kinerja operator KPU Kabupaten/Kota.

rencana Pemutakhiran Data Pemilih apa kesiapan KPU Provinsi Riau untuk menjamin data pemilih yang valid dan akurat.

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus memiliki kartu kendali dalam melakukan verifikasi data pemilih;
2. Laporan berjenjang yang terdokumentasi;
3. Memberikan pelatihan agar PPDP mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya.

Bentuk sosialisasi pilkada yang dilakukan KPU Provinsi Riau adalah:

- a. KPU Provinsi Riau, mengawali dengan mengikut sertakan Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal tersebut tercantum pada UU No. 10 tahun 2016 Pasal 133A yang berbunyi "Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih".

- b. KPU Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, yakni dengan melakukan Roadshow.
- c. Memanfaatkan Media Sosial (Medsos) dalam sosialisasi, karena pada zaman sekarang ini masyarakat sebagian besar menggunakan media sosial. Salah satu contoh kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengadakan sayembara dalam membuat MEME terkait pilkada.
- d. Membentuk Relawan Demokrasi yang merupakan tindak lanjut dari Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD)

2. Jumlah Pemilih Pemula

No.	KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Pemula			Keterangan
		L	P	Total	
1.	Bengkalis	3.468	3.365	6.833	DPT Pilkada 2015
2.	Indragiri Hulu	3.046	2.951	5.997	DPT Pilkada 2015
3.	Kepulauan Meranti	1.785	1.751	3.536	DPT Pilkada 2015
4.	Kota Dumai	2.033	1.964	3.997	DPT Pilkada 2015
5.	Kuantan Singingi	2.527	2.471	4.998	DPT Pilkada 2015
6.	Pelalawan	2.627	2.476	5.103	DPT Pilkada 2015
7.	Rokan Hilir	5.898	5.634	11.532	DPT Pilkada 2015
8.	Rokan Hulu	3.331	3.253	6.584	DPT Pilkada 2015
9.	Siak	2.514	2.581	5.095	DPT Pilkada 2015
10.	Pekanbaru	9.036	8.565	17.601	DPT Pilkada 2017
11.	Kampar	9.083	8.479	17.562	DPT Pilkada 2017
12.	Indragiri Hilir	5.581	6.334	11.915	BPS Kab. Inhil 2017
TOTAL		50.929	49.824	100.753	

3. Sosialisasi pilkada terhadap pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi *goes to campus* atau *goes to school* serta dengan mengadakan pertemuan forum OSIS SMA Riau, yang bertujuan agar anggota OSIS menjadi fasilitator untuk merangkul teman sebaya agar sadar pemilu.

kesiapan KPU Provinsi Riau terkait Rencana keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk penyediaan dan distribusi logistik Pilkada (Kotak dan Bilik Suara, Formulir dan Surat Suara) yaitu;

- Mengidentifikasi jumlah kotak suara lama yang masih layak pakai dan terstandar;
- Proses pengadaan e-katalog;
- Distribusi logistik yang bekerja sama dengan pihak pengamanan yaitu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal).

kesiapan KPU Provinsi Riau untuk menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis. Yaitu;

- Pihak saksi, Panwas, PPK, dan PPS mampu bekerja secara transparan dengan melibatkan Panwas lapangan dan membuat undangan terbuka untuk diskusi.
- KPU Riau melakukan rekrutmen petugas PPK dan PPS dengan membuat standar recruitment yang maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara membuat standar soal tertulis yang melibatkan akademisi dan psikolog.
- Melakukan scan C1 dan melakukan pengawalan daftar undangan/ C6 untuk benar benar dilihat tanda terima yang ada sehingga C6 sampai kepada pemilih.
- Pemilih harus memiliki e-KTP atau suket dan sudah harus dipetakan sebelum hari pemungutan.

koordinasi Pemerintah Provinsi Riau, Kepolisian, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kejaksaan dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak 2018 adalah:

- Koordinasi yang telah dilakukan sejauh ini sangat baik hal ini terlihat dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dari tahun 2014 untuk setiap tahapan.
- Contoh: Rekrutment anggota PPK dan PPS yang sebelumnya telah dibahas dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan forkompinda.

TERKAIT BAWASLU PROVINSI RIAU

NPHD Provinsi Riau ditandatangani 04 Juli 2017

- Usulan awal sebesar Rp 84.901.150.000, telah disetujui
- Rp. 84.901.150.000,- dan akan dicairkan dalam 3 (tiga) tahap :
- Tahap I di APBD Murni 2017 Rp. 10.000.000.000,-
- Tahap II di APBD-P 2017 Rp. 17.150.233.962,-
- Total 2017 Rp. 27.150.233.962
- Tahap III di APBD Murni 2018 Rp. 57.750.916.038,-

NPHD ditandatangani 05 September 2017

Usulan awal sebesar Rp 4.981.695.000,-, telah disetujui Rp. 4.836.065.000,- dan akan dicairkan dalam 2 (dua) tahap :

Tahap I di APBD Murni 2017 Rp. 2.000.000.000,-

Tahap II di APBD Murni 2018 Rp. 2.836.065.000,-

Belum ada Laporan atas segala bentuk pelanggaran pilkada dikarenakan baru adanya jadwal untuk penyusunan dan persetujuan NPHD. sedangkan jadwal tahapan pilkada serentak 2018 adalah pada bulan Januari 2018 jadwal masa pendaftaran pasangan calon.

TERKAIT KEPOLISIAN SUMATERA UTARA

“JAWABAN KEPOLISIAN ATAS PERTANYAAN DARI PARA ANGGOTA”

MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN SENTRA GAKKUMDU :

- Penerimaan laporan dilakukan oleh Pengawas pemilu dengan didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bersama).
- Pengawas Pemilu menanyakan perihal Laporan yang akan disampaikan oleh Pelapor dengan mengisikannya pada Form A1 Perbawaslu No. 11 Tahun 2014
- Dalam hal laporan/temuan diterima (diregistrasi), Pengawas Pemilu memberikan nomor Laporan dan memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada Pelapor.

PENGANGGARAN SENTRA GAKKUMDU :

- Berdasarkan UU No.10 Tahun 2016 Apabila terjadi Tindak Pidana Pemilihan maka anggaran proses penyelidikan dan penyidikan hingga P.21, menggunakan anggaran dari BAWASLU.

HASIL PILKADA KABUPATEN DAN KOTA :

- Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi tidak ditemukan adanya Tindak Pidana Pemilihan.
- Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tapanuli Tengah tidak ditemukan adanya Tindak Pidana Pemilihan.

C. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor Gubernur Riau.

Kunjungan anggota Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Riau untuk mengetahui secara langsung terhadap kesiapan dan persiapan untuk Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 serta kesiapan dan persiapan untuk menghadapi pemilu 2019. Provinsi Sumatera Utara untuk sejauh ini telah siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 2018 yang mana ada 1 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 1 Pilkada Kab/kota terdiri dari Kabupaten Indragiri Hilir.. Untuk sejauh ini juga dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Riau tidak ada Hambatan sama sekali.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Riau pada tanggal 29 September 2017. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 29 September 2017

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

TTD

Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si

A-39

